

ABSTRAK
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi pada Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk)

Oleh
Hedy Andre. K

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda sehingga dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki sehingga jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran selain itu jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk dan apakah akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan Putusan Nomor 1177/Pid.B/2016/PN.Tjk adalah melalui peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif di mana Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berpatokan pada Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP selain itu Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dalam melaksanakan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan lain. Peran ideal Kejaksaan adalah melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan serta melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk melakukan penyuluhan

Hedy Andre. K

kepada kalangan pelajar. Peran faktual Kejaksaan Negeri Tanjung Karang adalah melakukan penyidikan kembali kepada pelaku pencurian dengan kekerasan sebelum perkara pencurian dengan kekerasan di sidangkan atau masuk dalam penuntutan oleh hakim di pengadilan(2) Akibat hukumnya Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan perkara atas istrinya sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka Jaksa Penuntut Umum melanggar Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 3 poin e dan h serta Pasal 157 KUHApyang dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan cara tidak hormat.

Saran dalam penelitian ini adalah Kejaksaan hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum untuk mengurangi angka pencurian dengan kekerasan, Kejaksaan hendaknya meneliti dengan cermat penunjukan Jaksaserta Kejaksaan Negeri Tanjung Karang hendaknya melakukan penyelidikan dan memberikan putusan secara cepat apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.

Kata Kunci:Peran Kejaksaan, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

ROLE OF PROSECUTORS IN PROSECUTION OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE

(Study on Verdict Number 1177/Pid. B/2016/PN. Tjk)

By

Hedy Andre. K

Theft by violence is a crime against property so that in the prosecution, the Prosecutor acts for and on behalf of the State responsible according to the channel hierarchy so that the prosecutor must have a valid proof tool, for the sake of justice and The Truth In addition prosecutors act on the law and heed religious norms and morality, and must dig into the values of humanity, law, and justice that live in society. Therefore, the problem in this study is how the role of prosecutors in the prosecution of criminal acts of theft by the study violence verdict number 1177/Pid. B/2016/PN. TJK and what is the result of the attorney prosecuting prosecution based on matters His wife as a victim of violent criminal theft.

The approach to the problem used in this study is the normative and juridical juridical approach to empirical. The speakers in this study were the judges of the Tanjung Karang District Court, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang and academics of the Faculty of Law of Lampung University.

The results showed that: (1) The role of Tanjung Karang district attorney in implementing the prosecution of criminal acts of theft is accompanied by the ruling number 1177/Pid. B/2016/PN. TJK is through the normative role, the ideal role and factual role . The normative role in which the prosecutor prosecuting the prosecution of article 365 paragraph (1), paragraph (2) 1, the 2nd Book of the Criminal Code article 65 paragraph (1) of the criminal code and article 363 clause (1) of the 4th code of the criminal code of law jo article 65 paragraph (1) of the criminal code and about the type of criminal given by the judge in article 10 of the Penal code other than that of Tanjung Karang state attorney in carrying out its role in accordance with the laws that have been regulated in the regulation other. The ideal role of prosecutors is to implement the prevention of criminal acts of theft by violence through socialization to communities at the village level as well as implementing the prosecutor's school admission program to conduct counseling among students. The factual role of the Tanjung Karang District Attorney is to conduct a re-inquiry to the perpetrators with violence before the case of theft with violence in the state or entered into prosecution by a judge in court (2) due to the attorney's law Prosecution based on the case of his wife as a

Hedy Andre. K

victim of criminal acts of theft by force then the general closing attorney violated the Perja number: PER-067/A/JA/07/2007 concerning the Code of Conduct of Prosecutors article 3 points E and H and article 157 of the KUHAP that can be Penalty or dismissal.

The advice in this study is that the Prosecutor should conduct a legal counseling activities to reduce the number of violent theft, prosecutors should examine carefully the appointment of the attorney and the state attorney of Tanjung Karang should investigate and award quickly in the case of violations committed by the attorney.

Keywords: Role of Prosecutors, Criminal Acts, Theft With Violence